

KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (TANTANGAN DAN SOLUSINYA)

Oleh: Imam Faqih

Abstract

Indonesian with a very wide area that consists of thousands of ethnic groups, languages, religions, traditions and cultures also interact and mingle to form a multi-ethnic society. The migration of Arabs, China, and India to the Indonesian archipelago increased the diversity of the nation. Indonesian multiculturalism has the potential that can be developed to improve welfare. However, these conditions also potential to conflicts among ethnic groups, religious, and cultures. Horizontal conflicts that occurred in Sambas, Poso, Sampit, Tasikmalaya, and others show that multiculturalism needs to be managed so it gives positive impact on the progress and welfare of the community. In the Indonesian context, the awareness of multiculturalism needs to inculcated in the life of the nation and society. There are recognition and inter-ethnic tolerance that led to the establishment of cooperation and trust so as to create a peaceful and democratic life. As a multicultural country, Indonesia should have the awareness of multiculturalism that tribes who settle in the region establish interaction and communication between the healthy and dynamic society in order to create a democratic, harmonious, and peaceful community. Education is the starting point for reconstruction of multicultural culture in a democratic society. Through school teachers can instill pluralistic nature and practice into learners. Teachers need to be creative in bridging cultural plurality and a pluralistic and peaceful community. As the spearhead of multicultural education, teachers must have an adequate understanding of multiculturalism and multicultural education. In the teaching activities, teachers develop multiculture-oriented climate that highlights social justice and culture.

Keywords: multiculturalism, multicultural education.

Pendahuluan

Indonesia yang merupakan Negara multikultural terbesar di dunia, yang kemajemukannya dapat dilihat dari suku, ras, agama, etnis yang mempunyai budaya, bahasa dan agama serta keyakinan yang berbeda-beda, dan dari tingkat perbedaan pendidikan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan dan tingkat sosial budaya. Sudah sewajarnya warga masyarakat Indonesia memiliki rasa kebanggaan dengan hal ini. Namun, di lain pihak dengan munculnya rasa kebanggaan yang berlebihan akan melahirkan budaya primordialisme yang hanya mengunggulkan dan membanggakan golongan dan anggota suatu masyarakat tertentu yang mengimplikasikan pada konflik antar anggota masyarakat yang tidak sepaham dan sejalan.

Seakan menjadi kebiasaan negatif masyarakat di Indonesia, yang mengagungkan budaya *primordialisme* yaitu suatu pandangan atau anggapan yang mengunggulkan dan menonjolkan budaya atau kelompok sosial tertentu dan menganggap golongan atau anggota masyarakat di luar kelompok tersebut adalah tidak ada apa-apanya yang pada umumnya perbedaan itu berbasis pada *culture*, hal ini banyak terlihat di Indonesia misalnya dengan munculnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan suku bangsa tertentu. Bila dilihat secara holistik, adanya perkumpulan sejenis itu bukanlah suatu hal yang semata-mata bersifat negatif, di suatu wilayah tertentu perkumpulan tersebut dapat menjadi tempat/wadah untuk menghimpun dana untuk membangun dan mengembangkan sarana dan sumber daya yang ada sehingga langsung ataupun tidak langsung akan berdampak positif terhadap laju perkembangan budaya dan bangsa Indonesia. Namun, adanya anggapan negatif terhadap munculnya organisasi sebagaimana tersebut akan memicu disintegrasi negara Indonesia.

Kemajemukan dan keanekaragaman, merupakan sunatullah, tidak seorang pun yang dapat menghapuskannya. Tidak ada satu masyarakat yang benar-benar tunggal, tanpa ada perbedaan di dalamnya, ada kemajemukan masyarakat Indonesia ditambah dengan globalisasi sangat mempengaruhi interaksi sosial antara individu satu dengan individu lain.

Di era globalisasi interaksi antarbangsa menjadi semakin intensif, terbuka dan transparan. Proses saling mempengaruhi antar budaya kerap terjadi dalam interaksi tersebut. Namun proses itu tidak selalu berlangsung sebagai proses dua arah atau timbal balik yang berimbang, melainkan bisa jadi budaya yang satu pengaruh dominan terhadap budaya lainnya. Ini membuktikan bahwa saat ini nilai-nilai agama, budaya lokal dan jati diri bangsa seperti

kekeluargaan, keramahan dan sopan santun semakin memudar bersamaan dengan menguatnya materialisme, pergaulan bebas individualisme, konsumerisme dan hedonisme.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa budaya Indonesia belum mampu bersaing dengan budaya Barat. Lemahnya daya saing Indonesia di dunia Internasional, tidak lepas dari masih lemahnya sumber daya manusia yang ada. Permasalahan lemahnya kualitas SDM terkait erat masih rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Untuk menyikapi hal tersebut, salah satu yang perlu dilakukan adalah revitalisasi pendidikan. Revitalisasi pendidikan ini termasuk dalam hal perubahan paradigma kepemimpinan pendidikan, terutama dalam pola hubungan atasan bawahan yang semula bersifat hierarkis-otokratis menuju ke arah kemitraan bersama.

Model kepemimpinan demikian, diharapkan dapat mendorong motivasi, memberdayakan dirinya dan memiliki tanggung jawab atas tugas yang diembannya. Kepatuhan tidak lagi didasarkan pada kontrol eksternal namun berkembang dari hati sanubari disertai dengan pertimbangan rasionalnya. Kepemimpinan multi budaya pada pendidikan intinya merujuk pada upaya memberdayakan setiap komponen manusia yang multi budaya untuk terlibat dan bertanggung jawab dalam pendidikan. Setiap manusia dipandang sebagai individu yang memiliki kekuatan cipta, rasa dan karsa serta mempunyai tempat untuk berkembang sebagaimana mestinya, maka hal ini mempunyai kekuatan bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan strategi khusus untuk memecahkan persoalan tersebut melalui berbagai bidang; sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Berkaitan dengan hal ini, kepemimpinan pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep kepemimpinan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, dll. Karena itulah diperlukan kepemimpinan yang tepat dan mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme atau menanamkan nilai-nilai keberagaman yang inklusif pada seluruh komponen sekolah. Pada gilirannya, out-put yang dihasilkan dari sekolah tidak hanya cakap sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai keberagaman dalam memahami dan menghargai keberadaan para pemeluk agama dan kepercayaan lain.

Pendidikan Multikultural

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.¹ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.² Sedangkan multikulturalisme dapat diartikan sebagai suatu gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan.

Bila digeneralisasikan secara umum, maka pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang dalam kelompok sosial tertentu untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif agar dapat berkembang secara spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara dengan pola pembiasaan hidup dalam suatu perbedaan (agama, budaya, adat istiadat, suku bangsa, ras, dan sejenisnya) dan tidak mempermasalahkan adanya unsur perbedaan dimaksud yang bermuara pada pembiasaan hidup dengan menggunakan lebih dari satu unsur kebudayaan. Menurut James A. Banks pendidikan multikultural didefinisikan sebagai sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat. Pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas multikultural dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal bagi bangsanya.³

Pendidikan multikultural sejatinya merupakan pendidikan yang menjunjung tinggi persamaan hak dan martabat manusia. Berbagai bentuk tindakan diskriminasi yang didapatkan kelompok minoritas mendorong manusia untuk lebih gencar lagi melakukan tindakan

¹ Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia – edisi ketiga, cetakan ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka. 2005), hal:263

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 (1)

³ Banks, J.A, “Multicultural Education: Historical Development, Dimensions and Practice” In Review of Research in Education, vol. 19, edited by L. Darling- Hammond. (Washington, D.C.: American Educational Research Association, 1993), <http://lubisgrafura.wordpress.com/2013/09/10/pembelajaran-berbasis-multikultural/> diunduh tgl 20/03/2013

perlawanan terhadap dominasi mayoritas, salah satunya yaitu melalui pendidikan. Karena pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk mentransformasikan gagasan multikultural ini.

Karakteristik Pendidikan Multikultur

Pendidikan multikultural mengandung arti bahwa proses pendidikan yang diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan selalu mengutamakan unsur perbedaan sebagai hal yang biasa, sebagai implikasinya pendidikan multikultural membawa peserta didik untuk terbiasa dan tidak mempermasalahkan adanya perbedaan secara prinsip untuk bergaul dan berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang budaya, suku bangsa, agama, ras, maupun adat istiadat yang ada.

James A. Banks mengidentifikasi ada lima dimensi pendidikan multikultural yang diperkirakan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap perbedaan pelajar (siswa), yaitu⁴:

1. Dimensi integrasi isi/materi (*content integration*). Dimensi ini digunakan oleh guru untuk memberikan keterangan dengan ‘poin kunci’ pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda. Secara khusus, para guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang beragam. Salah satu pendekatan umum adalah mengakui kontribusinya, yaitu guru-guru bekerja ke dalam kurikulum mereka dengan membatasi fakta tentang semangat kepahlawanan dari berbagai kelompok. Di samping itu, rancangan pembelajaran dan unit pembelajarannya tidak dirubah. Dengan beberapa pendekatan, guru menambah beberapa unit atau topik secara khusus yang berkaitan dengan materi multikultural.
2. Dimensi konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*). Suatu dimensi dimana para guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan dengan pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri;
3. Dimensi pengurangan prasangka (*prejudice reduction*). Guru melakukan banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Sebagai contoh, ketika anak-anak masuk sekolah dengan perilaku negatif dan

⁴ James A Banks, *Introduction to Multicultural Education*, (New York: Paperback, 2007), hal: 30

memiliki kesalahpahaman terhadap ras atau etnik yang berbeda dan kelompok etnik lainnya, pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan perilaku intergroup yang lebih positif, penyediaan kondisi yang mapan dan pasti. Dua kondisi yang dimaksud adalah bahan pembelajaran yang memiliki citra yang positif tentang perbedaan kelompok dan menggunakan bahan pembelajaran tersebut secara konsisten dan terus-menerus. Penelitian menunjukkan bahwa para pelajar yang datang ke sekolah dengan banyak stereotipe, cenderung berperilaku negatif dan banyak melakukan kesalahpahaman terhadap kelompok etnik dan ras dari luar kelompoknya. Penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan teksbook multikultural atau bahan pengajaran lain dan strategi pembelajaran yang kooperatif dapat membantu para pelajar untuk mengembangkan perilaku dan persepsi terhadap ras yang lebih positif. Jenis strategi dan bahan dapat menghasilkan pilihan para pelajar untuk lebih bersahabat dengan ras luar, etnik dan kelompok budaya lain.

4. Dimensi pendidikan yang sama/adil (*equitable pedagogy*). Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok. Strategi dan aktivitas belajar yang dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan secara adil, antara lain dengan bentuk kerjasama (*cooperative learning*), dan bukan dengan cara-cara yang kompetitif (*competition learning*). Dimensi ini juga menyangkut pendidikan yang dirancang untuk membentuk lingkungan sekolah, menjadi banyak jenis kelompok, termasuk kelompok etnik, wanita, dan para pelajar dengan kebutuhan khusus yang akan memberikan pengalaman pendidikan persamaan hak dan persamaan memperoleh kesempatan belajar.
5. Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*). Dimensi ini penting dalam memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beranekaragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat, misalnya berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, partisipasi ekstra kurikuler dan penghargaan staff dalam merespon berbagai perbedaan yang ada di sekolah.

Konsep Kepemimpinan Multikultur

Konsep pendidikan multikultural di Negara-negara yang menganut konsep demokratis seperti Amerika Serikat dan Kanada, bukan hal yang baru lagi. Mereka telah melaksanakannya

khususnya dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit putih dan kulit hitam, yang bertujuan memajukan dan memelihara integritas nasional.

Pendidikan multicultural mengakui adanya keragaman etnik dan budaya dari masyarakat suatu bangsa, sebagaimana dikatakan R. Stavenhagen:

Religious, linguistic, and national minorities, as well as indigenous and tribal peoples were often subordinated, sometimes forcefully and against their will, to the interest of the state and the dominant society. While many people... had to discard their own cultures, languages, religions and traditions, and adapt to the alien norms and customs that were consolidated and reproduced through national institutions, including the educational and legal system. (Rudolfo Stavenhagen, 1996: 15)

Di Negara adi kuasa-Amerika Serikat sebagai contohnya muncul serangkaian konsep system tentang pluralitas yang berbeda-beda mulai dari melting pot sampai multikulturalisme. Sejak Colombus menemukan benua Amerika, berbagai macam bangsa telah menempati benua itu. Penduduk yang sudah berada di sana sebelum bangsa-bangsa Eropa membentuk koloni-koloni mereka di Amerika Utara, terdiri dari berbagai macam suku yang berbeda-beda bahasa dan budayanya. Tetapi dimata bangsa Anglo-Saxon yang menyebarkan koloni di abad ke-17 tanah di Negara baru itu ada kawasan yang tidak bertuan dan bangsa-bangsa yang ditemui di benua baru itu tak lebih dari makhluk primitive yang merupakan bagian dari alam yang mesti ditaklukkan. Dari perspektif kaum puritan yang menjadi acuan utama sebagian besar pendatang dari Inggris tersebut berbagai suku bangsa yang dilabel secara generic dengan nama "India" adalah salah satu bangsa kafir pemuja dewa yang membahayakan kehidupan komunitas berbasis agama tersebut. Di sisi terlihat bagaimana pandangan perspektif tunggal yang datang dari budaya tertentu membuat mata terhadap kenyataan keragaman yang ada.

Amerika Serikat ketika ingin membentuk masyarakat baru-pasca kemerdekaan (4 Juli 1776) baru disadari bahwa masyarakat terdiri dari berbagai ras dan asal Negara yang berbeda. Oleh karena itu, dalam hal ini Amerika mencoba mencari terobosan baru yaitu dengan menempuh strategi menjadikan sekolah sebagai pusat sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai baru yang di cita-citakan

Multikulturalisme secara etimologis marak digunakan pada tahun 1950-an. Pendidikan multicultural bisa di definisikan sebagai pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan cultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia

secara keseluruhan. Hal ini seiring dengan pendapat Paulo Freire, pendidikan bukan merupakan “menara gading” yang beruaha menjauhi realitas social dan budaya. Pendidikan menurutnya harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berprndidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestos social sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya.

Pendidikan multicultural (multicultural education) merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multicultural merupakan pengembang kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi, dan perhatian terhadap terhadap orang-orang non eropa (Hilliard, 1991-1992).

Sedangkan secara luas pendidikan multicultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnic, ras, budaya, strata social, dan agama.

Berbicara masalah konsep pendidikan multikulturalisme, James Bank (1994) menjelaskan bahwa pendidikan multicultural memiliki lima dimensi yang saling berkaitan diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Content integrations in instructional. adalah mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu
2. The Knowladge Construction Process in instructiona, adalah membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin)
3. An Equity Paedagogy in instructional. Adalah menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam, baik dari segi ras, budaya, maupun social
4. Trainning participation in instructional. Adalah melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olah raga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam rangka upaya menciptakan budaya akademik.
5. Prejudice Reduction in instructional adalah mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menemtukan metode pengajaran mereka

Dalam aktifitas pendidikan manapun, peserta didik merupakan sasaran (obyek) dan sekaligus sebagai subyek pendidikan. Oleh sebab itu, dalam memahami hakikat peserta didik,

para pendidik perlu dilengkapi pemahaman tentang ciri-ciri umum peserta didik. Setidaknya secara umum peserta didik dapat dilihat dari empat ciri sebagai berikut:

1. Peserta didik dalam keadaan sedang berdaya, maksudnya ia dalam keadaan berdaya untuk menggunakan kemampuannya, kemauannya, dan sebagainya
2. Peserta didik memiliki keinginan untuk berkembang ke arah dewasa
3. Peserta didik memiliki latar belakang budaya, etnis, agama yang berbeda
4. Peserta didik melakukan penjelajahan terhadap alam sekitarnya dengan potensi-potensi dasar yang dimilikinya secara individu

Dalam perspektif Tilaar, pendidikan multicultural berawal dari berkembangnya gagasan tentang “interkulturalisme” sesuai perang dunia ke II. Kemunculan gagasan dan kesadaran “interkulturalisme” ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain. Juga karena meningkatnya pluralitas di Negara-negara barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari Negaranegara baru merdeka ke amerika dan eropa (Tilaar, 2004: 23).

Dalam konsep pendidikan multicultural focus dari pendidikan multicultural tidak lagi diarahkan semata-mata pada kelompok rasial, agama, dan cultural domain atau mainstream. Focus demikian ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan intercultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream. Pendidikan multicultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (difference) atau “politic of recognition)” politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.

Dalam konteks tersebut, pendidikan multicultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap “indiferenc” dan “non-recognition” tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multicultural mencakup subyek-subyek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang: social, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya.

Paradigma seperti ini akan mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang “ethnic studies” untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan tentang subjek ini adalah untuk mencapai pemberdayaan (empowerment) bagi kelompok-kelompok minoritas dan disadvantaged.

Dalam konsep pendidikan, istilah pendidikan multicultural dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normative, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multicultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multicultural yang jelas mencakup subjek-subjek seperti: toleransi, tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama: bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik, demokratis dan pluralitas, kemanusiaan universal dan lain sebagainya

Dalam konteks teoritis, belajar dari model-model pendidikan multicultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh Negara-negara maju, dikenal lima pendekatan: pertama; pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. Kedua; pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman budaya, ketiga; pendidikan bagi pluralisme kebudayaan, keempat; pendidikan dwi budaya. Dan kelima; pendidikan multicultural sebagai pengalaman moral manusia.

Bagian penting dari pada pendidikan multicultural adalah bagaimana menumbuhkan sensitivitas siswa akan kebudayaan budaya masyarakat yang bersifat plural. Hal itu sesuai dan sejalan dengan pendapat Bennet (1986) yang menyatakan bahwa asumsi dasar pendidikan multicultural adalah bagaimana kelompok-kelompok etnik yang beragam dapat menentukan sendiri budaya asli yang mereka miliki, serta pada saat yang bersamaan dapat menjadi multicultural.

Dengan kata lain orang-orang yang dapat belajar tentang berbagai macam alternative untuk mempersepsi, berperilaku, dan mengevaluasi kelompok lainnya sehingga mereka dapat menyesuaikan kepada makrokultur yang diperlukan untuk kesejahteraan bersama, tanpa melakukan pengurangan penerimaan akan etnisitasnya sendiri yang orisinal.

Fokus perhatian pendidikan multicultural adalah memberikan wawasan budaya kepada anggota masyarakat agar mereka dapat hidup berdampingan secara damai dengan kelompok social lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil rekomendasi *APNIEVE UNESCO* yang menandakan bahwa hasil pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan anak didiknya, namun juga dalam hal penanaman dan pengembangan nilai-nilai dan afeksi mereka yakni dalam bentuk belajar bersama, berpartisipasi dan bekerja sama dengan individu/masyarakat dari kelompok budaya yang berlainan dalam segala aktivitas (Muthahir, 1997).

Secara lebih operasional Kazt menyatakan ada empat tujuan pendidikan multikultural, yaitu:

1. memberikan pengalaman belajar kepada siswa yang mengenalkan secara kritis dan kemampuan evaluasi untuk melawan isu-isu seperti realisme, demokrasi, partisipatory, dan exime.
2. mengembangkan keterampilan untuk klarifikasi nilai, termasuk kajian untuk mentransmisikan nilai-nilai yang laten dan manifest
3. untuk menguji dinamika keberagaman budaya dan implikasinya kepada strategi pembelajaran guru
4. mengkaji vareasi kebahasaan dan keberagaman gaya belajar sebagai dasar bagi pengembangan strategi pembelajaran yang sesuai

Adapun agar progam pendidikan multicultural berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan yakni memberikan perspektif multikultural, maka strategi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Belajar bagaimana dan dimana menentukan tujuan, informasi yang akurat tentang kelompok-kelompok kultur yang beragam
2. Identifikasi serta periksalah aspek-aspek positif individu atau kelompok etnik yang berbeda
3. Belajar toleran untuk keberagaman melalui eksperimentasi di dalam sekolah dan kelas dengan praktek-praktek dan kebiasaan yang berlainan
4. Dapatkan, jika memungkinkan pengalaman positif dari tangan pertama dengan kelompok-kelompok budaya yang beragam
5. Kembangkanlah prilaku-prilaku yang empatis melalui bermain peran (role playing) dan simulasi
6. Praktek penggunaan “perpective glasses”, yakni melihat suatu event babakan sejarah, atau isu-isu melalui perspektif kelompok budaya atau lainnya
7. kembangkan rasa penghargaan diri (self-esteem) seluruh siswa
8. Identifikasikan dan analisis streotip budaya
9. Identifikasikan seluruh kasus diskriminasi serta prasangka social yang berasal dari kehidupan siswa sehari-hari (Martorella, 1994:16).

Di dalam kepemimpinan multi-kultur ini, lebih ditujukan kepada budaya pemimpin (yang mempengaruhi) yang berbeda dengan pengikutnya (yang dipengaruhi). Maka kepemimpinan multi-kultur merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan memotivasi anggota grupnya yang berbeda budaya dengan sengaja dan tidak seimbang menuju sasaran yang diterapkan dengan mempertimbangkan pengetahuan dan sistem makna dari budaya yang berbeda didalam grup. Atau dengan kata lain adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi, budaya dan kondisi lingkungan yang beragam.

Tantangan dan Solusi

Studi mengenai kepemimpinan relatif baru, dalam ranah bidang perilaku organisasi. Terlebih ketika kerangka *culture education* dimasukkan dalam konteks kepemimpinan. oleh karena itu dibutuhkan suatu konseptualisasi model kepemimpinan Pendidikan Multikultural. Salah satu konseptualisasi telah ditawarkan oleh Dorfman (2003) yang menekankan pada dampak budaya pada kekuasaan pemimpin, karakteristik personal dari pemimpin, khususnya pada pencitraan diri pemimpin, dan pola interaksi antar pimpinan dan bawahan. Dampak budaya dirasakan melalui skema, naskah, dan prototype dari pemimpin dan bawahan. Lebih lanjut, citra yang diciptakan oleh pemimpin mungkin didorong oleh prototype pemimpin dan bawahan yang berhasil pada budaya setempat dimana ia berada.

Tantangan kepemimpinan pendidikan multikultural lainnya adalah adanya perpindahan orang dari satu budaya ke budaya yang lain atau juga merupakan perbandingan dari kepemimpinan pada suatu budaya tertentu dengan kepemimpinan di budaya lain yang saling berinteraksi dan berseberangan.

Dalam salah satu artikel, Graen dan Hui (1999) berpendapat bahwa persepsi dari apa yang dimaksud sebagai pemimpin global pada saat ini akan berubah. Dimana saat ini pemimpin ditransfer dari satu lokasi ke lokasi lain. Maka yang akan muncul adalah “*transcultural creative leaders*”. Mereka merupakan orang-orang yang dapat belajar untuk:

1. Merubah (transcend) akulturasi masa kecilnya dan menghormati budaya-budaya yang berbeda
2. Membangun hubungan kerja lintas-budaya untuk kepercayaan, penghormatan dan kewajiban
3. Terlibat dalam pemecahan masalah lintas budaya yang kreatif
4. Ikut terlibat dalam konstruksi budaya ketiga dalam berbagai operasi kerjanya.

Lebih lanjut Dorfman pun menggaris bawahi tentang beberapa hal yang perlu diperhitungkan dalam studi kepemimpinan lintas budaya. Terdapat empat hal yang perlu diperhatikan:

1. Budaya tidak statis, mereka dinamik dan secara terus menerus berevolusi
2. Meskipun pengukuran dalam budaya dikategorikan antara rendah dan tinggi, namun orientasi dan perspektif semacam ini tidaklah cocok untuk semua karakteristik
3. Setiap individu pasti merefleksikan nilai budaya yang berbeda-beda, mereka tidak selalu mencerminkan nilai indigenous budaya setempat
4. Perbedaan antar budaya, negara, cluster budaya merupakan batasan yang harus diperhatikan.

Konflik memiliki pengertian, suatu proses pergulatan hingga pertikaian individu dengan individu lainnya atau dalam suatu kelompok. Sebenarnya konflik pun menyertai individu yang disebut dikemudian dengan konflik bathin atau jiwa. Adapun penyebab konflik menurut Selo Soemardjan, adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu atau kelompok, adanya perbedaan kepribadian diantara individu/kelompok disebabkan faktor kebudayaan, perbedaan kepentingan diantara individu/kelompok, adanya perubahan sosial yang menyentuh pada tataran sistem nilai yang berlaku dimasyarakat.

Konflik terjadi pada masyarakat majemuk. Dimana kondisi sosio-kultur sangat mendukung kearah penyesuaian (adaptasi) individu atau suatu kelompok, hingga pada tataran pemahaman dan kedewasaan dalam bersikap dan bertindak. Pemahaman akan perbedaan dan bagaimana seharusnya kita bertindak dan bersikap atas perbedaan yang terjadi tersebut? Bukan menghilangkan, namun bagaimana sebenarnya perbedaan tersebut menjadi kekuatan yang luar biasa dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan besar.

Dalam mewujudkan individu yang mampu untuk memecahkan suatu konflik, ialah dengan melalui pendidikan, melalui komunikasi efektif (meminjam teori komunikatif Habbermas), atau melalui pengalaman, sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi individu yang sadar, paham dan bijak. Formula pemecahan konflik atau manajemen resolusi konflik adalah strategi penanggulangan konflik yang tidak saja mencakup apresiasi terhadap konflik yang berwujud perilaku menerima perbedaan dan keanekaragaman, tetapi juga menstimulinya, lalu menyelesaikannya guna mewujudkan perbaikan-perbaikan yang bermanfaat bagi kalangsungan hidup sistem sosial. Didalam diri individu pastilah memiliki potensi akan bagaimana *memenej* konflik tersebut? Hanya yang menjadi problem umumnya ialah kemampuan untuk mengasah

potensi tersebut. Dalam melakukan resolusi konflik, tidak terlepas atas sebuah proses yakni individu untuk mampu meneliti, menganalisa, mengkaji terkait essensi penyebab konflik yang terjadi.

Adakalanya kita terjebak pada proses analisa konflik yang parsial, sehingga dalam pemecahannya pun bersifat parsial, dan sulit untuk menyentuh tataran fundamental problematika yang sesungguhnya. Salah satunya kita juga terkadang terjebak pada proses dikotomi faktor politik, ekonomi, agama, sosial, atau budaya masyarakat. Semata itu. Meskipun itu dapat pula menjadi faktor penyebab, namun bukan mustahil bila hal tersebut hanyalah “*kata kunci*” yang bersifat sementara dalam proses kita mencari akar problematika yang sesungguhnya. Proses resolusi konflik memang dibutuhkan saat ini, dengan landasan keadilan, merupakan hasil yang didasarkan atas kesepakatan bersama, dan solidaritas individu/kelompok, menjadi sesuatu hal yang mesti selalu diperjuangkan oleh setiap individu/kelompok, sehingga memungkinkan terciptanya tatanan masyarakat majemuk yang senantiasa dinamis, progresif, serta damai, dan sejahtera.

Peran Kepemimpinan Pendidikan Berbasis Multikultural Dalam Penyelesaian Konflik Pada Institusi Pendidikan

Adanya dominasi budaya tertentu terhadap budaya lain di dalam satu komunitas, tak terkecuali dalam sebuah lembaga pendidikan dapat mengakibatkan ketegangan yang berujung kepada konflik. Hal demikian sering terjadi akibat adanya penempatan yang tidak tepat dalam identitas lokalpun universal pada saat berinteraksi maupun bersosialisasi. Sehingga seseorang tanpa adanya kesadaran yang lapang merasa benar dengan membawa dominasi identitas lokal ke dalam komunitas yang multikultural. Dalam hal ini perlu paradigma kepemimpinan yang tepat agar dominasi budaya tertentu dalam sebuah komunitas yang beragam tidak terjadi. Pada kasus kepemimpinan yang bersifat hierarkis-otokratis menuju kepemimpinan yang berbasis kemitraan bersama dalam naungan kepemimpinan pendidikan dengan paradigma multikultural.

Kepemimpinan hierarkis-otokratisseringkali diwarnai oleh sikap dan perilaku pemaksaan kehendak dan pragmatis, yang menyebabkan terbelenggunya sikap inovatif dan kreatif bawahan. Para bawahan cenderung bersikap apriori, sehingga dalam melakukan tugas dan kewajiban hanya berdasarkan perintah atasan. Dengan kondisi demikian akan sulit dicapai kinerja yang unggul. Maka perlu kebijakan perubahan kepemimpinan pendidikan yang dapat memberdayakan bawahan yang beranekaragaman budaya, etnik, agama dan kemampuan. Dalam hal ini Dimmock

dan Walkermenetengahkan tentang *Cross Cultural Leadership* (kepemimpinan lintas budaya) yaitu kepemimpinan yang berdasarkan pemahaman budaya yang ada sekaligus dampaknya terhadap kelangsungan masyarakat sosial dalam lingkup budaya tertentu. Model kepemimpinan demikian, diharapkan dapat mendorong motivasi, memberdayakan dirinya dan memiliki tanggung jawab atas tugas yang diembannya. Kepatuhan tidak lagi didasarkan pada kontrol eksternal namun berkembang dari hati sanubari disertai dengan pertimbangan rasionalnya. Kepemimpinan multi budaya pada pendidikan intinya merujuk pada upaya memperdayakan setiap komponen manusia yang multi budaya untuk terlibat dan bertanggung jawab dalam pendidikan. Setiap manusia dipandang sebagai individu yang memiliki kekuatan cipta, rasa dan karsa serta mempunyai tempat untuk berkembang sebagaimana mestinya, maka hal ini mempunyai kekuatan bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hersey dan Blanchard mengatakan bahwa gaya kepemimpinan akan sangat efektif apabila mengakomodir budaya dan lingkungan. Untuk itu ditawarkan konsep kepemimpinan multi-kultur, yaitu kepemimpinan yang menggunakan perspektif multikultural. Secara makna multi-kultur berarti membandingkan atau menangani dua atau lebih budaya yang berbeda terkait dengan berbagai budaya daerah, bangsa dan lainnya.

Di dalam kepemimpinan multi-kultur ini, lebih ditujukan kepada budaya pemimpin (yang mempengaruhi) yang berbeda dengan pengikutnya (yang dipengaruhi). Maka kepemimpinan multi-kultur merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan memotivasi anggota grupnya yang berbeda budaya dengan sengaja dan tidak seimbang menuju sasaran yang diterapkan dengan mempertimbangkan pengetahuan dan sistem makna dari budaya yang berbeda didalam grup. Atau dengan kata lain adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi, budaya dan kondisi lingkungan yang beragam.

Budaya secara tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku kepemimpinan. Hal itu dikemukakan oleh *Bowditch* dan *Buono*, dengan alasan bahwa sikap dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegangnya, dan nilai – nilai itu dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan sosial. Seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya perlu menyadari bahwa setiap individu, walaupun berada dalam satu unit kerja yang sama namun tetap memiliki nilai-nilai yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, agar proses kepemimpinan dapat berjalan dengan efektif, maka setiap pemimpin hendaknya menerapkan

gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi yang ada sehingga tidak menimbulkan masalah dan konflik dengan bawahannya dan organisasinya.

Penutup

Dari uraian mengenai kepemimpinan pendidikan multikultural, dapat disimpulkan bahwa efektifitas kepemimpinan pendidikan multikultural dipengaruhi oleh ketepatan kombinasi antara gaya, tipologi, dan model kepemimpinan yang dikembangkan si pemimpin sehingga berhasil secara ariief, efektif, dan produktif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi lingkungannya atau pun dalam mencapai tujuan yang diharapkan sekolah atau orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kompetensi kepemimpinan.

Kunci untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan, adalah keberanian untuk hidup berdasarkan visi yang kuat. Salah satu tema visi dalam pendidikan multicultural adalah menjadikan keragaman sebagai keunggulan dan kekuatan.

Kepemimpinan yang dibutuhkan pada pendidikan multicultural juga menghadirkan kombinasi dari konsep kepemimpinan transformasional dengan kepemimpinan transaksional, dilengkapi keunggulan prima (superleadership) dan mampu mengelola multibudaya (multicultural leadership), sehingga mampu hidup dan berkembang serta eksis dalam lingkungan yang hiperkompetisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, Susan A. 2006. *Cultural Foundation of Education* ,Ohio: Pearson Prentice Hall
- Bush, Tony & Coleman, Marianne, 2000.*Leadership and Strategic Management in Education*, London: ASAGE Publications Company
- Griffin, Ricky, 2002. *Bisnis Jilid 1*, Jakarta : PT Prenhallindo
- Iskandar, Syarifudin, 2006. *Konflik Etnik Dalam Masyarakat Majemuk*, UM Press: Malang,
- Mahfud, Choirul, 2007. *Pendidikan Multikultural* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Marzali, Amri, 2003. *Perbedaan Etnis dalam Konflik: Sebuah Analisis Sosio-Ekonomi Terhadap Kekerasan di Kalimantan dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat ini* ,Jakarta: INIS
- Tri, 2003. *Mencari Kedamaian di Maluku: Suatu Pendekatan Historis Politis dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat ini* ,Jakarta: INIS
- Robbin, Stephen, 1996. *Perilaku Organisasi*,Jakarta : PT. Prenhallindo
- Siagian, Sondang P.2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* Jakarta: Grasindo
- Yaqin, M. Ainul, 2007. *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan* Yogyakarta: Pilar Media